

MIGRASI INTERNASIONAL DAN PEMBANGUNAN DAERAH: REALITAS DAN DUALISME KEBIJAKAN LOKAL

Abdul Haris

ABSTRACT

This study was an effort to understand the Sasak people migration phenomena to Malaysia and how those activities were placed in the local development policies. This study was also done to understand its contribution in development process. This research was carried out in East Lombok and some sub-districts had been taken as area research sample, such as Pringgasele, Masbagik, Keruak and Sakra. The sample of research areas were chosen because statistically, were the most potential international migration sources in East Lombok and Lombok island in general.

Based on this research, there are three conditions that force the Sasak people migrate from their area of origin to Malaysia, e.g: poverty, lack of opportunity, and low wage compare to destination country. The inability of local government to create new opportunity has become a main factor in all of the migration process. The increasing of employment growth that unbalanced with the growth of opportunity also creates open unemployment and under unemployment at the origin. This fact caused frustration among those of productive age that pushed them to get a better alternative of their own.

The fact also shows that local government faced difficulties to put returnees in a clear position in local development process. This was because there is no regulation that gives possibilities for returnees to involve in all of development process and policy implementation. Migrant participation in a whole development process, therefore, cannot be seen as a program made by government in order to give chance to the returnees directly involved.

The other facts show of migrant workers' contribution in local economic development. The increasing of economic activities and local trading, workers substitution from farm to non farm are the real phenomenon that can be seen as their contribution in the whole of development process. At the macro level, migrants' contribution has created new opportunity to improve economic activities. This phenomenon may causes that specific group such as labor agents, and "calos" (middlemen) will dominate local capital.

It can't be denied, however, that the involvement of Sasaknese migrants creates a balance of local labor market, specifically in their origin that also create a new polarization based on classical reasons such as skills and training. Finally it cannot avoid that the polarization will create differentiation based on skill and working status. Furthermore, these facts will create broader opportunity and labor market competition in formal and informal sectors that motivate small and medium economic activities at the origin.

Keywords : International Migration, Regional Development

PENGANTAR

Studi ini merupakan upaya memahami fenomena migrasi orang Sasak asal Lombok Timur khususnya ke Malaysia, dan bagaimana aktivitas migrasi internasional ditempatkan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan daerah setempat. Di samping itu, penelitian ini juga dilakukan untuk memahami bagaimana kontribusi migrasi internasional dalam proses pembangunan lokal yang dilaksanakan. Lokasi penelitian dilakukan di kabupaten Lombok Timur dengan sampel di kecamatan Pringgasele, kecamatan Masbagik, kecamatan Keruang, dan kecamatan Sakra. Daerah-daerah ini dipilih sebagai sampel karena secara statistik daerah-daerah tersebut termasuk kantong-kantong migrasi internasional paling potensial di wilayah kabupaten Lombok Timur.

Penelitian ini terutama ditujukan untuk mengkaji dan mengidentifikasi pengaruh migrasi internasional terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi daerah Nusa Tenggara Barat khususnya Pulau Lombok, mengkaji sejauhmana migrasi internasional dijadikan sebagai strategi ekonomi alternatif oleh migran dan keluarganya di dalam menghadapi tekanan-tekanan baik sebelum krisis maupun setelah krisis ekonomi berlangsung. Dalam konteks ini migrasi internasional dipandang sebagai salah satu pilihan di samping pilihan-pilihan ekonomi lain, seperti melakukan migrasi sirkuler atau ulang-

alik ke wilayah-wilayah terdekat atau melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan di sektor informal. Di samping dua tujuan itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengkaji sejauhmana kebijakan-kebijakan (khususnya pemerintah daerah) mampu mendorong terjadinya peningkatan kualitas sumberdaya manusia terutama melalui formulasi kebijakan migrasi yang lebih berorientasi kepada kepentingan pembangunan daerah bersangkutan. Hasil penelitian ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai masukan dalam perbaikan-perbaikan kebijakan bidang migrasi internasional baik pada tingkat lokal maupun pada tingkat pusat.

Metode observasi partisipatif dan wawancara mendalam terhadap informan-informan kunci terpilih merupakan metode yang dominan digunakan dalam penelitian ini. Namun demikian, untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut, metode survai juga digunakan untuk melihat perkembangan migrasi internasional yang terjadi secara kuantitatif. Metode kualitatif dalam penelitian ini digunakan terutama untuk lebih memahami persoalan-persoalan kualitatif yang tidak dapat terungkap melalui kegiatan survai. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa aktivitas penelitian kualitatif dilakukan untuk mengenal lebih secara mendalam persoalan-persoalan yang

menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh melalui kegiatan survai dianalisis dengan dengan metode statistik sederhana melalui tabulasi silang dan tabel frekuensi. Adapun data-data yang diperoleh melalui kegiatan kualitatif dianalisis secara deskriptif menggunakan metode interpretasi. Di samping itu juga digunakan metode analisis dokumentasi melalui data-data yang sekunder yang tersedia, terutama data-data yang tersedia di instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Untuk mendapatkan validitas data yang lebih objektif kemudian dilakukan triangulasi data maupun metode.

GAMBARAN WILAYAH

Kondisi geografis wilayah pulau Lombok yang relatif terbuka cukup berpengaruh dalam menentukan volume dan arah migrasi internasional yang terjadi. Hal ini mengingat bahwa realitas geografis, baik yang menyangkut letak, jarak geografis, kondisi tofografi wilayah secara teoritis tidak dapat dipisahkan dari seluruh rangkaian perkembangan aktivitas mobilitas penduduk yang terjadi dari dan ke wilayah tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks diskusi di dalam disertasi ini persoalan tersebut menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan. Volume migrasi maupun pola migrasi yang berkembang dari pulau Lombok sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi nyata yang ada di daerah bersangkutan. Letak geografis

misalnya, sangat berpengaruh pada pilihan arah dan pola migrasi yang dilakukan migran. Letak strategis yang dimiliki secara geografis berpengaruh terhadap tingkat perkembangan ekonomi daerah bersangkutan. Hal ini pada gilirannya berimbas pada model mobilitas yang dipilih.

Dalam konteks migrasi internasional yang berasal dari Lombok, posisi geografis daerah juga ikut memberi pengaruh pada pola dan arus migrasi yang berkembang. Hal ini disamping berkaitan dengan akses migrasi dan biaya migrasi antar negara juga berkaitan dengan aspek sejarah migrasi yang berlangsung antara daerah asal dan daerah tujuan terkait.

Kabupaten Lombok Timur merupakan wilayah kabupaten yang letaknya cukup strategis di wilayah timur Pulau Lombok karena posisinya yang merupakan jembatan ekonomi yang menghubungkan wilayah Nusa Tenggara Barat dan wilayah Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini terletak diantara 116-117 BT, 8-9 LS dengan batas-batas sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lombok tengah dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Alas yang memotong Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Melihat kondisi geografisnya, kabupaten Lombok Timur termasuk daerah yang cukup potensial secara ekonomi. Kekayaan alam yang kaya terutama dari sektor perikanan dan kehutanan merupakan andalan daerah yang dapat dieksplorasi

untuk kepentingan pembangunan daerah.

Wilayah ujung timur pulau Lombok ini sekaligus merupakan salah satu pintu keluar menuju kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, akses transportasi laut dari ini termasuk cukup baik, lebih-lebih posisinya sebagai wilayah penyangga berdekatan dengan wilayah pertambangan (emas) terbesar kedua setelah Free Port Papua. Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa meskipun akses transportasi laut ke berbagai wilayah lain cukup memadai, hubungan transportasi darat justru merupakan persoalan yang cukup memprihatinkan, terutama berkaitan dengan transportasi darat antar pulau maupun antar propinsi. Di dalam wilayah kabupaten Lombok Timur sendiri, sebagian besar angkutan darat yang menghubungkan antar daerah masih menggunakan angkutan tradisional, dan kendaraan-kendaraan kapasitas kecil, seperti sepeda motor maupun colt-colt angkutan perdesaan.

Hubungan dengan luar negeri khususnya dengan Malaysia bisa dilakukan melalui gerbang timur ke arah Sumbawa menuju Malaysia Timur melalui Makasar atau Kalimantan Selatan. Adapun hubungan ke Malaysia barat bisa melalui gerbang Barat melalui Bali Jawa, Sumatera memasuki wilayah pantai timur Malaysia Barat. Jalinan ini secara historis sesungguhnya telah berlangsung cukup lama dan berlangsung secara tradisional. Formalitas politis kemudian

mengubah pola hubungan yang terjadi menjadi hubungan formal melalui batasan-batasan hukum dan politik yang jelas. Oleh karena itu, formalisasi tersebut kemudian melahirkan terminologi-terminologi legal atau illegal terhadap kasus-kasus migran antarnegara yang terjadi.

Arus migrasi yang berlangsung dari Lombok Timur khususnya dan Nusa Tenggara barat umumnya sebagian besar telah berlangsung cukup lama. Jauh sebelum program pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri di sosialisasikan oleh pemerintah, aktivitas migrasi internasional yang berlangsung dari Nusa Tenggara Barat sudah berlangsung secara tradisional, terutama yang dilakukan mengikuti aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan. Hal ini juga tidak terlepas dari terbukanya akses perhubungan laut dari sebagian besar wilayah perairan Nusa Tenggara Barat.

POTENSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jika dilihat dari sisi ekonomi, sebagian besar kehidupan perekonomian di Kabupaten Lombok Timur didukung oleh aktivitas pertanian. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa aktivitas ekonomi non pertanian tidak berkembang. Aktivitas ini hampir dapat dikatakan menjadi salah satu faktor sekunder yang memiliki andil dalam pengembangan perekonomian di seluruh wilayah kabupaten Lombok Timur. Aktivitas

bervariasi. Untuk itu, wilayah ini dikenal juga dengan daerah lumbung padi di Nusa Tenggara Barat. Meskipun demikian, berhasilnya pembangunan ekonomi di sektor pertanian kenyataannya tidak mampu menekan angka migrasi ke luar negeri, seperti ke Malaysia. Tabel berikut memperlihatkan jenis tanaman padi yang ditanam secara rutin oleh petani di beberapa wilayah yang dijadikan sebagai wilayah sampel penelitian.

Kecuali bekerja sebagai petani, sebagian penduduk juga melakukan aktivitas sebagai peternak sapi. Aktivitas peternak di beberapa kecamatan dan Pulau Lombok pada umumnya merupakan suatu kegiatan yang telah berlangsung lama. Untuk itu, tidak mengherankan jika banyak penduduk di wilayah tersebut sekaligus juga bekerja sebagai pedagang sapi (*belantik*). Jika dilihat secara historis, Lombok telah lama dikenal sebagai salah satu penghasil ternak sapi di Indonesia. Bahkan pada masa kolonial, Lombok pernah menjadi salah satu daerah pengekspor sapi terbesar ke Hongkong dan beberapa negara Asia lainnya (Salam, 1992).

Disamping aktivitas sektor pertanian yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah ini, sektor non pertanian pun dapat dikatakan memegang peranan penting. Akan tetapi, pertumbuhan sektor non-pertanian tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada perkembangan aktivitas sektor pertanian. Ini berarti bahwa sektor non pertanian sesungguhnya merupakan sektor sekunder yang pelayanannya

tergantung pada kondisi pertumbuhan ekonomi makro wilayah bersangkutan.

Sektor industri rumah tangga (kerajinan) merupakan sektor yang paling dominan berkembang di luar sektor pertanian. Sektor ini hampir terdapat di desa-desa di seluruh wilayah kabupaten. Namun demikian, tidak semua desa mampu mengembangkannya secara serius menjadi sebuah industri yang layak jual.

Kecamatan Masbagik dan kecamatan Pringgasele yang menjadi sampel penelitian ini merupakan wilayah yang mampu mengembangkan industri kerajinan, khususnya kerajinan tenun *gedogan* sebagai salah satu andalan yang pantas dibanggakan. Hal ini terutama didukung oleh kondisi daerah setempat sebagai daerah tujuan wisata. Pertumbuhan industri kerajinan tenun *gedogan* di daerah tersebut secara umum telah mampu memberi andil dalam meningkatkan pendapatan penduduk.

Sejak digalakkannya pembangunan di daerah tersebut sebagai daerah tujuan wisata, pertumbuhan industri kerajinan tenun mengalami perkembangan yang cukup pesat. Jika sebelumnya kerajinan tenun merupakan tugas budaya yang harus diemban oleh setiap wanita yang berangkat dewasa, maka sekarang industri kerajinan tenun merupakan usaha untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga yang melibatkan banyak tenaga kerja wanita tanpa melihat perbedaan umur. Dengan demikian, dapat dikatakan industri kerajinan tenun dapat

ini meliputi kerajinan tenun, gerabah, dan kerajinan anyaman.

Sistem irigasi yang dikembangkan di wilayah-wilayah pertanian potensial, kenyataannya mampu menghasilkan panen yang dapat menggairahkan kehidupan perekonomian wilayah tersebut. Subak misalnya, merupakan sebuah sistem irigasi yang masih diterapkan di beberapa wilayah guna melindungi kepentingan petani dari konflik akibat pembagian pengairan yang kurang merata. Sistem ini merupakan sebuah sistem pengairan yang dikelola secara adat dengan pengawasan dari pemerintah kecamatan melalui mantri pengairan. Berbeda dengan pengertian subak di Bali yang berfungsi religius, yaitu sebagian dari aktivitas ritual, subak yang dimaksudkan dalam konteks masyarakat Sasak lebih difungsikan sebagai alat kontrol produksi pertanian. Dengan demikian tidak berkaitan dengan aktivitas keagamaan.

Kecuali bertumpu pada sektor pertanian, kehidupan perekonomian wilayah tersebut juga mengandalkan sektor non pertanian, seperti industri pariwisata, dan industri kerajinan. Sektor pariwisata, khususnya wisata alam merupakan salah satu andalan yang banyak mendatangkan devisa. Wilayah pengunungan di bagian utara kabupaten tersebut merupakan salah satu tujuan wisata yang banyak memancing wisatawan manca negara maupun domestik. Hal tersebut mengingat kondisinya yang masih sangat alami jauh dari polusi, dan memiliki nilai sejarah yang sangat

tinggi sebagai peninggalan kolonial Belanda.

Maraknya pertumbuhan pariwisata di daerah ini pada gilirannya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi atau tingkat pendapatan penduduk secara keseluruhan. Kecuali itu, hal yang tidak kalah pentingnya dari penggalakan industri pariwisata tersebut adalah berkembangnya sektor-sektor ekonomi informal sebagai sektor ekonomi alternatif. Hal ini, misalnya terlihat pada pesatnya perkembangan industri kerajinan, dan perdagangan yang berpengaruh pada peningkatan *income* perkapita penduduk.

Dalam kaitannya dengan diskusi ini, ada dua hal yang dianggap penting untuk dilihat, terutama berkaitan dengan pembangunan pertanian dan aktivitas nonpertanian, yaitu aktivitas sektor pertanian dan sektor non pertanian. Seperti telah disinggung di depan bahwa sektor pertanian merupakan sektor andalan yang memberi banyak sumbangan dalam menggiatkan pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan. Hal ini mengingat bahwa sebagian besar wilayah kabupaten Lombok Timur merupakan wilayah pertanian lahan basah yang memanfaatkan sistem irigasi campuran (*mix irrigation system*), yaitu yang dikenal dengan sistem Subak, yang berbeda dengan pengertian subak seperti yang ada di Bali, dan pengairan teknis. Dengan sistem pengairan semacam ini, petani di wilayah tersebut mampu menghasilkan panen 3-4 kali setahun dengan jenis tanaman padi yang

dikatakan merupakan salah satu produksi subsistensi di luar sektor pertanian.

Berkembangnya industri tenun rumah tangga tersebut pada gilirannya mempengaruhi tingkat pendapatan penduduk yang berasal dari luar aktivitas pertanian. Tabel berikut menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi di luar sektor pertanian selama kurun waktu 2000 (sampai saat penelitian dilakukan). Dari data yang diperlihatkan diatas dapat dilihat bahwa industri kerajinan tenun merupakan industri kerajinan yang paling dominan dikerjakan di beberapa wilayah kabupaten Lombok Timur. Namun demikian, tingkat produktivitasnya yang relatif rendah menyebabkan industri ini mengalami kesulitan untuk berkembang sehingga untuk menyerap banyak tenaga kerja pun hampir tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu sebagian besar tenaga kerja yang tertampung di sektor ini memilih alternatif lain seperti melakukan migrasi ke luar untuk tujuan-tujuan ekonomi produktif lainnya.

Data yang ditemukan memperlihatkan jumlah penduduk usia produktif di kabupaten Lombok Timur yang melakukan aktivitas di luar sektor pertanian yaitu 168.329 atau 45,8 persen dari jumlah penduduk usia penduduk produktif. Ini berarti aktivitas sektor pertanian masih menjadi primadona untuk sementara waktu. Hal yang menarik adalah bahwa jika melihat perbandingan desa kota terlihat bahwa aktivitas sektor non pertanian justru lebih besar di

pedesaan dibandingkan dengan perkotaan.

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh sebagian besar aktivitas ekonomi non pertanian pun masih berkembang di luar wilayah perkotaan yang cenderung menjadi pusat pemerintahan. Namun demikian, besarnya jumlah penduduk usia produktif yang bekerja di sektor pertanian tidak diikuti oleh terjadinya peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, besarnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian sementara produktivitas persatuan tenaga kerja rendah menyebabkan penduduk mencari alternatif lain yang dianggap memiliki produktivitas yang lebih baik. Pilihan menjadi tenaga kerja ke luar negeri kemudian menjadi alternatif meskipun sesungguhnya calon tenaga kerja bersangkutan sama sekali buta tentang kondisi sebenarnya dari daerah tujuan.

Manipulasi informasi yang dilakukan oleh para calo tenaga kerja (*taikong*) khususnya menyangkut kondisi kerja dan terutama upah yang akan diterima oleh tenaga kerja menyebabkan calon migran potensial tidak lagi dapat mengambil pertimbangan-pertimbangan jernih. Disamping itu, beban hidup yang makin bertambah sementara produktivitasnya di daerah asal dipandang tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya juga menyebabkan calon migran memutuskan untuk bermigrasi keluar menuju wilayah yang dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi.

Tabel 1
PENDUDUK LOMBOK TIMUR BERUMUR
10 TAHUN KE ATAS MENURUT
LAPANGAN USAHA 2000

Lapangan Usaha	L + P	Persentase
Pertanian	167.880	42,6
Pertambangan/Penggalian	10.830	2,7
Indutri Pengolahan	43.230	11,0
Listrik/gas/Air bersih	-	-
Bangunan	16.898	4,3
Perdagangan/Hotel/restoran	85.469	21,6
Transportasi dan komunikasi	29.429	7,5
Jasa Keuangan	2.043	0,5
Jasa Kemasyarakatan	38.953	9,8
Lainnya	-	-
Total	394732	100

Sumber: Lombok Timur dalam Angka 2000

Sebelum ditetapkan undang-undang otonomi daerah, perencanaan pembangunan daerah baik pada tingkat propinsi maupun pada tingkat kabupaten di dasarkan pada rencana pembangunan lima tahunan yang tertuang dalam REPELITA dan REPELITADA. Perencanaan pembangunan melalui perencanaan terencana lima tahunan tersebut lebih memiliki karakter sentralistis. Perencanaan dan prioritas pembangunan di daerah kemudian sangat tergantung pada prioritas politik yang kurang mengakar pada kebutuhan daerah setempat.

Reformasi politik yang terjadi pada beberapa tahun lalu telah menciptakan warna baru bagi

perencanaan pembangunan wilayah di seluruh Indonesia. Kehadiran semangat reformasi dan otonomi daerah telah menciptakan kesegaran baru dalam perencanaan pembangunan yang benar-benar berdasarkan kepada kepentingan daerah bersangkutan. Meskipun disadari bahwa kehadiran reformasi pembangunan yang terlalu prematur tersebut telah menciptakan konflik kepentingan pusat dan daerah, tetapi secara makro telah memberikan pelajaran berharga bagi daerah dalam merencanakan dan melakukan pembangunan berdasarkan kebutuhan daerahnya masing-masing.

Kabupaten Lombok Timur yang merupakan salah satu kabupaten

di Nusa Tenggara Barat pun mulai melakukan penataan dan perencanaan-perencanaan pembangunan ke depan. Rencana Pembangunan Strategis kabupaten (RENSTRA) merupakan ujud semangat lokalitas dalam proses pembangunan daerah yang bertumpu pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat daerah. Renstra yang merupakan acuan dasar atau pedoman pembangunan yang dilaksanakan tersebut merupakan penjabaran misi pembangunan yang dirancang untuk kepentingan dua tahun ke depan. Perubahan-perubahan perencanaan pembangunan dari sistem perencanaan lima tahunan (PELITA) ke pola perencanaan dua tahunan (RENSTRA) secara teoritis mempermudah dilakukannya evaluasi keberhasilan pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Di samping itu, sistem tersebut juga memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan mendadak skala prioritas pembangunan yang tidak terpikir pada saat perumusan renstra periode pembangunan yang sedang berjalan.

Untuk mensukseskan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam renstra pembangunan daerah tersebut, kabupaten telah melakukan efektivitas pelaksanaan pembangunan melalui upaya pengembangan wilayah kecamatan dari sepuluh kecamatan sebelum reformasi menjadi 20 kecamatan pasca otonomi daerah. Pengembangan wilayah kecamatan ini pada gilirannya diharapkan mampu secara efektif melaksanakan program-

program pembangunan yang telah dijabarkan dalam garis-garis besar pembangunan daerah yang tertuang dalam rencana strategis pembangunan daerah.

Ada tiga isu penting yang patut mendapat perhatian serius dalam konteks diskusi yang dilakukan ini yaitu isu-isu yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sumberdaya manusia dan pemberdayaan potensi sumberdaya alam. Ketiga isu ini dianggap penting karena memiliki kaitan yang bersifat dialektik dengan isu-isu migrasi internasional yang berkembang terutama dari kabupaten Lombok Timur. Dua isu pertama (ekonomi dan sumberdaya manusia) merupakan isu yang paling erat relevansinya dengan fenomena dalam seluruh diskusi mengingat peranannya yang sangat besar dalam aktivitas-aktivitas migrasi yang berlangsung. Isu-isu tersebut dapat menjadi variabel penting untuk melihat dari status sosial-ekonomi macam apa migran berasal dan jenis pekerjaan apa saja yang mampu dilakukan migran, baik di daerah asal maupun di daerah tujuan.

Seperti telah dibicarakan dalam bab-bab terdahulu bahwa efektifitas pelaksanaan pembangunan tidak akan dapat dicapai tanpa melakukan perencanaan matang yang berakar pada kepentingan-kepentingan masyarakat lokal. Oleh karena itu, redefinisi dan rekonseptualisasi pembangunan dengan melakukan perubahan-perubahan paradigma pembangunan yang sebelumnya bersifat sentralistik

diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan lokal dalam seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal pula kemungkinan muncul sikap *over confidence* dari pemerintah setempat yang menyebabkan orientasi pembangunan keluar dari arah yang telah ditetapkan dalam Renstra pembangunan daerah.

Dalam konteks migrasi internasional yang banyak berlangsung terutama dari daerah-daerah penelitian, pemerintah daerah secara umum telah berupaya memposisikan isu tersebut dalam konteks pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi, substansi perencanaan pembangunan bidang tersebut belum mempertimbangkan kontribusi remitan dari tenaga kerja yang melakukan aktivitas ekonomi di luar negeri sebagai salah satu komponen penting yang dapat dilibatkan dalam pembangunan ekonomi pada umumnya. Kondisi ini menyebabkan isu migrasi internasional yang sebenarnya paling menonjol di wilayah Lombok Timur menjadi kurang diperhitungkan dalam proses pembangunan yang dilaksanakan.

Realitas makro yang ada adalah bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk menempatkan migran pada satu posisi yang jelas di dalam proses pembangunan daerah karena tidak adanya suatu regulasi yang memungkinkan migran untuk terlibat aktif dalam implementasi kebijakan pembangunan. Oleh karena itu,

keterlibatan migran dalam seluruh proses pembangunan daerah tidak dapat dilihat sebagai sebuah program yang sengaja dibangun pemerintah untuk memberikan peluang kepada keterlibatan langsung migran. Hal ini pada gilirannya menciptakan kondisi yang kurang menguntungkan bagi kelompok besar migran pekerja internasional dari daerah bersangkutan.

MIGRASI INTERNASIONAL: PROSES DAN LEGALITAS

Kebijakan pemerintah lokal dalam bidang ketenagakerjaan khususnya menyangkut aktivitas migrasi tenaga kerja luar negeri yang dituangkan dalam salah satu poin dalam rencana strategis pembangunan wilayah merupakan hal positif yang dapat dilihat selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada masa-masa sebelumnya persoalan migrasi tenaga kerja asal Lombok bagi pemerintah setempat hampir dapat dikatakan menjadi aib yang tabu dibicarakan. Hal ini karena aktivitas tersebut dianggap sebagai beban politis pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat umumnya. Namun demikian, seiring dengan perkembangan dan keterbukaan daerah, pemerintah lokal pun mulai mengambil sikap kebijakan yang rasional. Migrasi internasional mulai dilihat sebagai sebuah aspek penting dalam proses pembangunan lokal. Kenyataan ini misalnya terlihat pada masuknya aspek migrasi dalam rencana strategis pembangunan daerah di samping masuknya persoalan tersebut dalam rencana

APBD yang menganggarkan dana klinik tenaga kerja sebesar 1,5 milyar pada tahun 2002.

Meskipun demikian, berdasarkan observasi yang dilakukan sepanjang penelitian program tersebut lebih bermuatan politis dibandingkan dengan kepentingan pemberdayaan ekonomi migrasi. Hal ini menyebabkan program yang sebenarnya sangat strategis tersebut hampir tidak dapat berjalan seperti diharapkan. Paling tidak ada tiga hal yang menyebabkan kenapa program tersebut tidak berhasil baik. Pertama, kebijakan penganggaran klinik tenaga kerja belum memiliki arah yang jelas. Dalam arti bahwa konsep klinik tenaga kerja yang menjadi salah satu program pembangunan bidang ekonomi tersebut tidak memiliki arah yang cukup jelas. Hal ini menyebabkan interpretasi implementor di lapangan cenderung berdasarkan kepentingan-kepentingan pengambil kebijakan di tingkat yang lebih rendah, seperti kecamatan atau kelurahan. Kedua, program tersebut tidak dilengkapi perangkat peraturan yang sekaligus dapat menjadi kontrol bagi pelaksanaan program di lapangan. Ketiga, tidak adanya model dan target yang jelas dari program klinik yang dimaksudkan. Ketiga persoalan inilah yang pada gilirannya menjadi kendala lapangan yang menyebabkan program klinik tenaga kerja yang telah digagas tidak memperlihatkan pengaruh nyata pada upaya-upaya perbaikan seperti yang dicita-citakan dalam APBD.

Terlepas dari kontroversi tersebut, secara teoritis perkembangan

migrasi internasional tidak dapat dipisahkan dari perkembangan regional yang meliputi aspek-aspek ekonomi, politik, sosial bahkan budaya. Oleh karena itu dapat pula dikatakan bahwa fenomena migrasi sesungguhnya merupakan bagian integral dari sebuah proses pembangunan yang memiliki karakter-karakter universal. Dalam konteks makro, secara teoritis makin baik pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau negara makin besar kemungkinan terciptanya perluasan kerja dan pada gilirannya makin besar pula peluang terjadinya aktivitas migrasi masuk maupun migrasi keluar.

Berbicara pola migrasi pada hakikatnya adalah membicarakan model dan jalur migrasi yang dilakukan dari suatu wilayah ke wilayah lain. Hal ini mengingat bahwa pola dan bentuk migrasi yang berkembang sangat tergantung pada kemampuan sosial-ekonomi pelaku mobilitas pada saat melakukan aktivitas tersebut. Migran Sasak asal Lombok pun secara umum melakukan aktivitas migrasi mengikuti kemampuan sosial dan ekonomi yang dimiliki. Oleh karena itu, dalam konteks migrasi yang berlangsung dari Lombok ke Malaysia, aktivitas tersebut sangat kental dengan nuansa ekonomi dan kepentingan-kepentingan sosial kelompok masyarakat Sasak terutama di daerah asal masing-masing migran.

Dalam konteks ekonomi aktivitas migrasi yang berlangsung semata-mata dilakukan atas dasar kepentingan ekonomi, yaitu melakukan aktivitas ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan

kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, aktivitas tersebut juga dilakukan dalam rangka meningkatkan status sosial migran dan keluarganya di daerah asal. Meskipun dalam konteks ini posisi migran pekerja di daerah tujuan berada pada level terendah dalam struktur sosial dan ekonomi, tetapi di daerah asalnya migran dan keluarganya mengalami peningkatan status yang sangat berarti.

Realitas meningkatnya status sosial-ekonomi migran dan keluarganya mendorong kelompok-kelompok penduduk potensial untuk mengambil langkah-langkah ekonomi alternatif tersebut untuk keluar dari tekanan ekonomi di samping keinginan untuk meningkatkan *bargaining* sosial-kultural dalam komunitas masyarakatnya. Melakukan aktivitas migrasi internasional terutama ke Malaysia menjadi pilihan utama yang dilakukan oleh kelompok penduduk Sasak pada umumnya.

Fakta yang ditemukan sepanjang penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua negara telah melakukan koreksi-koreksi birokrasi migrasi, tetapi sangat sulit untuk memisahkan pendekatan informal dalam seluruh proses migrasi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Sasak khususnya dari pulau Lombok. Paling kurang ada tiga faktor penting yang menyebabkan kedua jalur birokrasi yang berseberangan tersebut dapat berjalan bersama. Pertama, jalur-jalur non formal yang berkembang dalam aktivitas migrasi orang Sasak jauh lebih populer dibandingkan dengan birokrasi legal yang digunakan

sebagai pendekatan pemerintah. Kedua, sebagian besar migran dan calon migran potensial memandang jalur-jalur alternatif non formal masih diperlukan sebagai jembatan untuk memperoleh pekerjaan di negara tujuan lebih cepat. Dengan demikian, birokrasi legal formal hanya diperlukan untuk melengkapi dokumen perjalanan dan dokumen kerja yang dibutuhkan. Ketiga, persepsi masyarakat dan keluarga migran potensial terlanjur menganggap jalur legal yang diselenggarakan pemerintah terlalu mahal dan memakan waktu lebih lama. Hal ini menyebabkan popularitas pemerintah khususnya Departemen Tenaga Kerja dan Pemerintah Daerah umumnya hampir tidak mendapat legitimasi sosial dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja luar negeri.

Salah satu karakter yang paling menonjol dari aktivitas migrasi orang Sasak asal Lombok adalah bahwa sebagian besar aktivitas migrasi yang dilakukan terutama ke luar negeri berlangsung dalam kerangka ekonomi. Ini berarti bahwa kepentingan ekonomi merupakan alasan utama yang mendorong sebagian besar migran Sasak melakukan perjalanan ke Malaysia atau ke negara-negara lainnya. Di sisi lain, keterampilan yang rendah dan kualitas pendidikan pekerja migran yang juga rendah menjadi ciri lain yang melekat pada aktivitas migrasi yang berlangsung. Kondisi tersebut pada gilirannya menyebabkan rendahnya pemahaman sebagian besar tenaga kerja terhadap perkembangan

proses birokrasi khususnya dalam bidang ketenagakerjaan.

Namun demikian, kesadaran lokal pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai di segala bidang seiring dengan semangat otonomi daerah membuka ruang cukup lebar untuk terjadinya dialog antara berbagai elemen kepentingan yang bersebarangan. Di dalam konteks dialog yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah terbukanya ruang dialog antara kepentingan tenaga kerja dan calon tenaga kerja migran potensial dengan kepentingan pemerintah lokal secara keseluruhan. Oleh karena itu, sebagai bentuk kesadaran pemerintah untuk membina potensi tenaga kerja yang ada dan berdasarkan realitas lokal pemerintah telah memasukkan komponen tenaga kerja migran internasional di dalam kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada, seperti dilakukan pemerintah daerah Lombok Timur. Masuknya komponen pembinaan tenaga kerja yang disebut sebagai program klinik tenaga kerja dalam Rencana Anggaran Pembangunan Daerah (RAPBD) misalnya merupakan bentuk nyata dari keinginan pemerintah untuk secara serius mempertimbangkan aspek tenaga kerja internasional dalam proses pembangunan.

Di sisi lain dalam konteks yang lebih luas, khususnya berkaitan dengan mekanisme pembinaan tenaga kerja internasional pemerintah daerah telah secara jelas memberikan perhatian serius meskipun secara legal belum ada aturan yang benar-benar mengatur

mekanisme pembinaan dan pemanfaatan tenaga kerja lokal seperti adanya perangkat aturan daerah dalam bidang yang dimaksud. Namun demikian, upaya-upaya ke arah tersebut telah dilakukan meskipun diakui adanya kendala-kendala politis akibat tumpang tindihnya kepentingan berbagai kelompok.

Dengan demikian, berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan sepanjang penelitian dilakukan menunjukkan bahwa aspek legal dalam proses migrasi internasional hampir menjadi hal yang hampir kurang diperhatikan sebagian besar tenaga kerja migran asal Lombok. Hal ini paling kurang disebabkan oleh tiga hal penting. Pertama, dominasi agen-agen penempatan TKI ke luar negeri lebih kuat dibandingkan dengan agen pemerintah maupun agen pengerah jasa tenaga kerja lainnya yang secara legal formal dilegitimasi oleh pemerintah. Kedua, meskipun dokumen keemigrasian dibuat sebagai kelengkapan dokumen kerja luar negeri, kenyataannya sebagian besar tenaga kerja hampir tidak mengetahui manfaatnya terutama secara politis kecuali sebagai alat untuk mengeliminir resiko terutama di negara tujuan. Ketiga, pemerintah daerah tidak memiliki perangkat aturan yang mampu melindungi kepentingan tenaga kerja sekaligus aturan yang mengatur ruang dialog kemitraan pemerintah dan mantan migran tenaga kerja dalam proses pembangunan baik secara parsial maupun secara sektoral. Realitas ini menyebabkan makin tajamnya perbedaan-perbedaan antara

kepentingan pemerintah di satu sisi dengan kepentingan ekonomi tenaga kerja dan keluarganya di sisi lain.

Melihat kenyataan yang ada sepanjang penelitian, maka sangatlah wajar jika legalitas prosedur migrasi yang ditawarkan pemerintah melalui departemen tenaga kerja hampir tidak mendapat respon publik yang memadai. Dengan demikian, realitas sosial ekonomi migran, seperti tingkat pendapatan, ketrampilan dan pendidikan sebagian besar migran seperti disinggung dalam bab-bab terdahulu dapat memperjelas kegagalan-kegagalan pemerintah daerah dalam program penempatan tenaga kerja legal yang dikirim terutama ke Malaysia dan negara-negara Asia Pasifik lainnya.

Dalam konteks migrasi ilegal yang berkembang dari pulau Lombok khususnya dari Lombok Timur, kedua paradigma ekonomi maupun birokrasi menjadi hal dominan yang mendorong berkembang bentuk migrasi ilegal. Dari aspek ekonomi, rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan peluang kerja yang memadai menjadi hal dominan menyebabkan terjadinya eksodus tenaga kerja ke luar negeri terutama ke Malaysia yang memiliki kesempatan kerja lebih luas dan bervariasi. Realitas ini diperburuk lagi oleh tingginya perbedaan tingkat upah antara kedua wilayah seperti dibicarakan pada bagian-bagian awal diskusi dalam disertasi ini.

Di sisi lain, karakter birokrasi migrasi yang relatif ketat dan sedikit "korup" baik di negara asal maupun

negara tujuan juga memberikan peluang bagi berkembangnya bentuk migrasi ilegal. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan sepanjang penelitian di titik-titik penting yang berkaitan dengan aktivitas migrasi internasional, seperti di Imigrasi dan DEPNAKER sendiri terlihat bahwa ketatnya birokrasi migrasi sebenarnya sangat terkait dengan mental birokrat yang kurang memadai untuk sebuah aktivitas pelayanan publik. Untuk sebuah proses pasporisasi di Imigrasi misalnya, sebuah paspor baru yang normalnya seharga Rp.250.000-Rp.300.000 bisa menjadi lebih dari Rp. 1.000.000. Kondisi ini menyebabkan seorang calo agen tenaga kerja akan memberikan tarip pengurusan dokumen satu setengah kali lipat di atas harga yang dihabiskan untuk mengeluarkan dokumen keimigrasian.

D A M P A K M I G R A S I INTERNASIONAL TERHADAP PEMBANGUNAN LOKAL

Berdasarkan rangkaian penelitian yang dilakukan, paling kurang ditemukan ada tiga kondisi yang menyebabkan migran pekerja orang Sasak dari Lombok Timur mengambil keputusan melakukan aktivitas di luar wilayahnya. Ketiga kondisi tersebut adalah, kemiskinan, rendahnya kesempatan kerja dan rendahnya tingkat upah persatuan tenaga kerja.

Tingginya angka kemiskinan di daerah asal menyebabkan sebagian besar penduduknya mencari kemungkinan-kemungkinan lain di luar wilayahnya untuk tetap bertahan.

Kesulitan-kesulitan ekonomi tersebut kemudian mendorong mereka untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi rasional yang mungkin. Migrasi internasional merupakan salah satu pilihan yang dianggap paling rasional meskipun mereka juga sadar dengan berbagai resiko yang mungkin terjadi. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di daerah asal migran yang didukung oleh makin sempitnya lahan pertanian sebagai akibat desakan penduduk yang tidak berimbang juga menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan peningkatan aktivitas migrasi keluar dari daerah-daerah bersangkutan.

Di samping kemiskinan, rendahnya tingkat upah di daerah juga menjadi faktor penting lain yang berpengaruh besar terhadap besarnya volume migrasi internasional. Adanya kesenjangan tingkat upah per satuan tenaga kerja yang sangat mencolok antara daerah asal dan daerah tujuan menjadi faktor dominan yang menyebabkan aliran tenaga kerja internasional keluar dalam jumlah yang hampir tidak dapat diprediksi. Keluarnya sebagian besar tenaga kerja tersebut lebih jauh menimbulkan kerugian-kerugian besar di daerah asal terutama berkaitan dengan implikasinya terhadap meningkatnya ongkos per satuan produksi. Di sektor pertanian terjadi stagnasi produksi. Lahan-lahan pertanian yang ditinggalkan oleh migran hampir tidak dapat melakukan produksi secara maksimal karena tenaga kerja yang ada sebelumnya tidak lagi tertarik dengan upah yang

dianggap tidak kompetitif.

Kondisi yang kurang menguntungkan tersebut diperburuk lagi oleh kuatnya pengaruh calo tenaga kerja yang terus-menerus menawarkan kesempatan kerja di luar negeri khususnya di Malaysia dengan membuat perbandingan-perbandingan "semu", tanpa diimbangi oleh intervensi pemerintah yang memadai. Dengan kata lain, dalam seluruh proses migrasi internasional pemerintah hampir tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pengendali dan penentu kebijakan yang mengatur mekanisme keluar masuknya migran dari dan ke luar negeri.

Seerti telah disinggung dalam seluruh analisis dan diskusi yang dilakukan sebelumnya, rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menginisiasi kesempatan kerja baru bagi banyak tenaga kerjanya juga menjadi faktor penting yang mendorong berlangsungnya aktivitas migrasi dalam jumlah yang relatif besar. Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja mendorong terjadinya pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran di daerah asal. Hal ini menyebabkan munculnya rasa perustasi di kalangan kelompok penduduk usia kerja yang pada gilirannya mendorong kelompok tersebut mencari alternatif sendiri yang dianggap lebih baik. Migrasi internasional (terutama yang dilakukan secara illegal) kemudian menjadi alternatif lain mungkin untuk tetap

bisa bertahan, meskipun sebagian besar mereka mengambil pilihan tersebut dengan segala resiko yang disadari.

Namun demikian, jika dilihat berdasarkan karakteristik migran, dapat disimpulkan bahwa aktivitas migrasi yang berlangsung dari kabupaten Lombok Timur sebagian besar dilakukan oleh kelompok usia produktif. Kelompok ini secara berkelompok melakukan aktivitas migrasi sebagai bentuk pilihan alternatif paling rasional untuk keluar dari jerat pengangguran dan

dilakukan oleh kelompok-kelompok migran Sasak cenderung dilakukan di dalam kerangka jaringan kerja yang dibangun secara tradisional dan dilegitimasi secara sosial kultural oleh sebagian besar masyarakat Sasak. Kondisi inilah yang menyebabkan pemerintah setempat mengalami kesulitan untuk membekukan atau paling kurang mengurangi aktivitas migrasi illegal dari daerah bersangkutan.

Di samping di lihat dari aspek pendidikan, sebagian besar migran Sasak yang melakukan aktivitas migrasi

Tabel 2
KOMPOSISI UMUR MIGRAN ILEGAL SASAK
YANG MELAKUKAN MIGRASI KE MALAYSIA BARAT
HINGGA 2001

Umur Migran	Jumlah	Persentase
10-19	35	10
20-24	111	31,7
25-29	79	22,6
30-34	68	19,4
35-39	33	9,4
40-44	15	4,3
45+	9	2,6
Jumlah	350	100

Sumber : Data primer 2001

kemiskinan di daerah asal. Gelombang migrasi yang dilakukan secara berkelompok ini dilakukan secara terkoordinir melalui titik-titik pemberangkatan yang ditentukan atas persetujuan antara kelompok migran dengan kelompok calo atau agen pengerah jasa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa aktivitas migrasi yang

ke luar negeri terutama melalui jalur illegal sebagian besarnya memiliki latar belakang Sekolah Dasar ke bawah. Hal ini memberikan gambaran bahwa aktivitas migrasi yang dilakukan dilakukan oleh kelompok penduduk yang tidak memiliki keterampilan kecuali melakukan aktivitas di sektor pekerjaan kasar seperti buruh tani dan

petani penggarap (bukan pemilik). Berdasarkan hal ini dapat pula dikatakan bahwa aktivitas yang dilakukan merupakan aktivitas ekonomi yang semata-mata ditujukan untuk mendapatkan penghasilan dan meningkatkan status sosial ekonomi keluarganya. Realitas ini juga terlihat dari latar belakang ekonomi sebagian besar migran yang berangkat dari status sosial ekonomi menengah ke bawah bahkan ada yang berasal dari keluarga yang tidak mampu sama sekali.

Realitas lain yang ditemukan adalah bahwa sebagian besar migran juga merupakan kelompok penduduk yang sudah kawin. Ini mengindikasikan bahwa beban ekonomi keluarga yang ditanggung oleh migran sebagai kepala keluarga menyebabkan mereka mengambil keputusan-keputusan yang dianggap paling rasional dan dapat memberikan peluang bagi peningkatan status ekonominya. Meskipun

demikian, tidak dapat disangkal pula untuk alasan-alasan yang berbeda aktivitas migrasi yang sama juga dilakukan oleh kelompok penduduk dari tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi yang berbeda dari kebanyakan migran tenaga kerja bersangkutan.

Secara teoritis, potensi besar sumber daya manusia yang tersedia di daerah pada hakikatnya merupakan salah satu modal pembangunan yang sangat penting. Akan tetapi, jika kebutuhan pembangunan akan sumberdaya manusia tidak sebanding dengan jumlah persediaan tenaga kerja, maka sudah pasti akan terjadi persaingan yang sangat tinggi. Akibatnya terjadi penumpukan tenaga kerja sebagai konsekuensi daya serap pasar yang rendah. Realitas ini menyebabkan migrasi tenaga kerja khususnya yang berasal dari Lombok Timur melakukan aktivitas migrasi dalam jangkauan yang lebih luas

Tabel 3
JUMLAH MIGRAN ILEGAL SASAK BERDASARKAN
UMUR DAN PENDIDIKAN

Umur Migran	Tingkat Pendidikan						Jumlah	%
	SD KBW	%	SLTP	%	SLTA +	%		
10-24	84	32,0	50	77,0	12	52,2	146	41,7
25-29	69	26,3	7	10,8	3	13,0	79	22,6
30-34	56	21,7	4	6,1	8	34,8	68	19,4
35-39	29	11,0	4	6,1	-	-	33	9,4
40+	24	9,0	-	-	-	-	24	6,9
Jumlah	262	100	65	100	23	100	350	100

Sumber : Data Primer, 2001

seperti migrasi internasional. Namun demikian, realitas ekonomi yang tidak menguntungkan, seperti rendahnya tingkat pendapatan keluarga yang rata-rata hanya Rp. 10.000 rupiah per hari dibandingkan dengan beban keluarga yang rata-rata 5 orang per keluarga menyebabkan sebagian besar memilih jalur alternatif migrasi.

Hal yang patut dicatat dari tingginya tingkat persaingan tenaga kerja tersebut adalah bahwa secara teoritis jika persaingan makin tinggi, maka pada tingkat tertentu akan diikuti pula oleh munculnya kompetisi tenaga kerja berdasarkan kualitas yang dibutuhkan pasar. Kondisi ini pada gilirannya membagi kelompok tenaga kerja ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok *skilled* yang bersaing untuk memperoleh posisi tawar yang lebih tinggi di satu sisi, dan di kelompok lain bersaing pula kelompok *unskilled* dan kelompok *skilled* yang tersingkir dari persaingan di level pasar yang lebih berkualitas. Kelompok pertama yang tersingkir ini pun kemudian melakukan desakan ke bawah sehingga menimbulkan munculnya kelompok-kelompok marginal yang tidak mampu bersaing untuk memperoleh kesempatan kerja di pasar kerja nasional maupun lokal. Kelompok inilah yang kebanyakan melakukan mobilitas ke luar ke daerah-daerah lain yang dianggap memiliki kemungkinan ekonomi lebih baik.

Hal menarik yang juga dapat dilihat dari penelitian ini adalah bahwa aktivitas migrasi yang dilakukan oleh kelompok migran sasak dari daerah

penelitian memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah. Jumlah besar devisa yang dihasilkan terutama melalui remitan yang dikirim ke daerah secara umum juga memberikan sumbangan besar kepada daerah sehingga proses pembangunan yang dilakukan tanpa disadari juga dibantu oleh kelompok migran tersebut. Namun demikian, di sisi lain, meskipun kontribusinya cukup besar dalam proses pembangunan, aktivitas yang dilakukan belum diperhitungkan di dalam seluruh kebijakan pembangunan yang dibuat terutama pada tingkat lokal. Kondisi ini secara makro memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah belum memiliki kepedulian terhadap fenomena migrasi yang berkembang di daerahnya meskipun sebenarnya pemerintah setempat menyadari besarnya kontribusi yang diberikan oleh migran meskipun pada skala mikro. Oleh karena itu, melihat perkembangan positif besarnya angka remitan yang dihasilkan oleh kelompok migran tenaga kerja tersebut, pemerintah daerah nampaknya perlu memikirkan suatu model pemberdayaan ekonomi yang mampu menarik sebagian besar dana yang dibawa oleh tenaga kerja dari luar negeri untuk kepentingan-kepentingan pembangunan ekonomi yang lebih luas.

Akan tetapi, jika dilihat secara lebih mendalam jumlah besar remitan yang masuk ke Nusa Tenggara Barat dan khususnya ke wilayah kabupaten Lombok Timur kenyataannya tidak mampu secara signifikan mendorong

Tabel 5
RATA-RATA PENGIRIMAN MIGRAN ASAL KECAMATAN MASBAGIK
LOMBOK TIMUR DARI MALAYSIA 1999-2001

Rata-rata Pengiriman	Kuantitas Pengiriman											
	1999/2000						2000/2001*					
	√2	%	3-4	%	4	%	√2	%	3-4	%	4	%
M\$ 1.000												
M\$ 1.100-2.900	15	42,9	48	17,4	21		7	20,0	62	22,5	33	84,6
M\$ 3.000-5.500	11	31,4	87	31,5	12	3,83	13	37,1	83	30,0	6	15,4
M\$ 5.600	9	25,7	129	46,7	6	0,8	11	31,4	13	47,1	-	-
	-		12	4,4	-	15,4	4	11,5	0	0,4	-	-
									1			
Total	35	100	276	100	39	100	35	100	276	100	39	100
Total N = 350												

Sumber: Data Primer 2001

*data sampai saat survei Agustus 2001

terjadinya peningkatan ekonomi, kecuali pada skala-sekala kecil. Hal ini paling kurang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, putaran uang yang masuk hanya terjadi di antara calo-calo yang secara ekonomi memiliki akses menguasai sistem pengiriman migrasi pekerja (ilegal) yang cenderung menggunakan sistem "ijon tenaga". Kedua, sifat pengiriman remitan yang sangat eksklusif melalui kurir dan migran kembali menyebabkan sulitnya memprediksi jumlah putaran uang yang mengalir di daerah asal karena seringkali muncul pemerasan-pemerasan atau pemotongan-pemotongan liar yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu baik di pemerintahan maupun yang seringkali dilakukan oleh oknum-oknum petugas di tempat-tempat strategis dalam perjalanan migran pulang ke daerah asal.

Di samping itu, dari data lapangan yang diperoleh menunjukkan

terjadinya perubahan-perubahan status sosial yang sangat berarti terutama bagi migran dan keluarganya di daerah asal. Terjadinya perubahan status sosial, misalnya dari seorang petani menjadi seorang pedagang atau bekerja di sektor jasa lainnya dapat menjadi indikasi terjadinya peningkatan status ekonomi migran dan keluarganya. Kenyataan ini dapat memberikan gambaran ke arah mana suatu peristiwa mobilitas sosial berlangsung. Kondisi ini secara umum tidak terlepas dari besarnya arus remitan yang masuk ke daerah asal migran yang kemudian mendorong terjadinya perubahan-perubahan pada skala yang lebih luas

Berkaitan dengan isu-isu sosial-ekonomi yang berkembang di sekitar aktivitas migrasi internasional yang terjadi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan-perubahan mendasar yang

sangat signifikan terutama berkaitan dengan perubahan status ekonomi migran yang ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita keluarga migran di daerah asal dan berubahnya pola konsumsi masyarakat

dengan baik. Hal ini terutama disebabkan antara lain oleh kurang jelasnya arah kebijakan pengembangan sumberdaya manusia yang dilakukan.

Berangkat dari suatu semangat lokalitas yang kuat sebagai ciri

Tabel 6
MIGRAN KEMBALI YANG BERALIH PROFESI PASCA MIGRASI
BERDASARKAN DAERAH TUJUAN MIGRASINYA 2001

Negara /Tujuan Migrasi	Pekerjaan Sebelum Migrasi				Pekerjaan Setelah Migrasi			
	Pertanian*		Non Pertanian		Pertanian		Non Pertanian	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Malaysia Timur	27	13,8	13	8,4	14	9,9	26	12,5
Malaysia Barat	168	86,2	134	86,4	126	88,7	176	84,6
Negara lainnya	-	-	8	5,2	2	1,4	6	2,9
Jumlah	195	100	155	100	142	100	208	100
N = 350								

Sumber: Data Primer 2001

*termasuk buruh tani dan petani penggarap

termasuk pertukangan, perdagangan, pengerajin, ojek, penarik becak termasuk penganggur.

secara umum di daerah bersangkutan.

Dalam konteks pembangunan lokal, meskipun secara politis sebenarnya program pemberdayaan ekonomi migrasi internasional khususnya di kabupaten Lombok Timur telah didukung melalui kebijakan pembangunan daerah (APBD Lombok Timur, 2002) dengan mengalokasikan anggaran 1,5 milyar untuk kninik tenaga kerja, tetapi secara substansial sesungguhnya strategi tersebut belum sepenuhnya berjalan

kelompok migran, aktivitas yang dilakukan terutama oleh kelompok migran sasak selalu dilakukan dalam koridor solidaritas etnik. Hal ini terlihat dari kuatnya jaringan migrasi yang terbangun di antara masyarakat Sasak pada sektor-sektor kerja tertentu, baik di negara asal maupun negara tujuan. Sebagai sebuah kelompok etnik yang memiliki ciri solidaritas etnik yang kuat, masyarakat Sasak dalam setiap aktivitas yang dilakukan dibangun oleh formulasi-

formulasi kelompok sebagai basis aktivitas ekonominya pada lapisan bawah dimana sebagian besar mereka melakukan aktivitas.

Dalam konteks lokal kehadiran kelompok migran kembali pun memiliki dimensi positif bagi pertumbuhan pasar kerja lokal. Hal ini mengingat secara ekonomi kelompok migran tersebut sesungguhnya memiliki modal cukup untuk bersaing di pasar kerja yang ada. Di samping modal ketrampilan yang diperoleh selama migrasi, kelompok ini juga memiliki kemungkinan lebih besar untuk menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa kelompok-kelompok migran kembali orang Sasak dapat menjadi suatu agen transformasi pembangunan yang cukup penting di wilayah asalnya.

Fakta yang ditemukan sepanjang penelitian menunjukkan adanya kontribusi besar migran Sasak terutama dalam proses pembangunan ekonomi daerah. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan perdagangan lokal, terjadinya substitusi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian merupakan fenomena yang dapat dilihat secara nyata dari keterlibatan migran dalam bidang-bidang pembangunan yang dimaksud. Oleh karena itu, tidak berlebihan pula jika kelompok migran Sasak dapat dianggap sebagai "agen" pembangunan terutama bagi daerahnya masing-masing.

Secara makro, keterlibatan kelompok besar migran dalam proses pembangunan tersebut telah membuka

peluang-peluang baru untuk berkembangnya aktivitas ekonomi dan terciptanya peluang kerja baru. Hal ini lebih jauh akan memberikan implikasi pada terjadinya akumulasi putaran "modal daerah" yang semula didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu seperti calo dan agen pengerah jasa tenaga kerja. Dengan demikian, arus migrasi internasional keluar akan mengalami perubahan karena orientasi ekonomi yang semula ada di luar wilayahnya akan kembali bergerak di dalam internal daerah sebagai akibat terjadinya perimbangan upah yang rasional.

Meskipun demikian, tidak dapat disangkal pula bahwa keterlibatan migran Sasak dalam menciptakan keseimbangan pasar di daerahnya juga menciptakan polarisasi-polarisasi baru berdasarkan alasan-alasan klasik pada tingkat ketrampilan dan pendidikan pekerja. Akhirnya tidak dapat dihindari pula bahwa polarisasi tersebut juga akan menciptakan perbedaan-perbedaan berdasarkan tingkat pendidikan dan status pekerjaan yang ada. Hal ini lebih jauh akan memberikan kesempatan lebih besar untuk munculnya persaingan-persaingan kerja yang pada tingkat pekerjaan formal dan pada sektor-sektor informal yang menggerakkan munculnya kegiatan ekonomi skala menengah dan kecil.

Dalam konteks berkembangnya semangat lokalitas pembangunan, maka peran migran kembali dalam proses pembangunan daerah pun tidak dapat dianggap marginal. Oleh karena itu, dapat pula

dikatakan bahwa kontribusi migran dan migran kembali dalam proses pembangunan daerah harus dipertimbangkan sebagai variabel penting di samping variabel-variabel lain yang telah telah diakui sebagai komponen untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah.

Namun demikian, dalam seluruh proses migrasi yang dilakukan orang Sasak mitos kemiskinan hampir melekat dalam seluruh aktivitas yang dilakukan. Hal ini pada gilirannya memberikan warna di dalam seluruh proses migrasi yang berlangsung di dalam masyarakat Sasak. Kondisi ini telah melemahkan posisi migran di dalam seluruh proses aktivitas pasar kerja, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Buruknya posisi tawar pekerja migran tersebut diperburuk lagi oleh kebijakan penempatan tenaga kerja internasional yang tidak memiliki dasar hukum cukup kuat untuk memberikan jaminan perlindungan kepada migran pekerja

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dirumuskan sebagai berikut. *Pertama*, berdasarkan rangkaian penelitian yang dilakukan paling kurang ditemukan tiga kondisi penting yang menyebabkan migran pekerja orang Sasak dari Lombok Timur melakukan aktivitas migrasi, yaitu kemiskinan, rendahnya kesempatan kerja dan rendahnya tingkat upah di daerah asalnya.

Kedua, aktivitas migrasi yang dilakukan oleh kelompok migran Sasak dari daerah penelitian memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah. Jumlah besar devisa yang dihasilkan terutama melalui remitan yang dikirim ke daerah juga memberikan sumbangan besar kepada daerah sehingga proses pembangunan yang dilakukan tanpa disadari oleh pemerintah lokal telah dibantu oleh kelompok migran pekerja.

Ketiga, berdasarkan data lapangan yang diperoleh menunjukkan terjadinya perubahan-perubahan status social yang sangat berarti terutama bagi migran dan keluarganya di daerah asal. Terjadinya perubahan status sosial, misalnya dari seorang petani menjadi seorang pedagang atau bekerja di sektor jasa lainnya menjadi indikasi penting terjadinya peningkatan status sosial-ekonomi migran dan keluarganya.

Keempat, dalam konteks lokal kehadiran kelompok migran kembali memiliki dimensi positif bagi pertumbuhan pasar kerja lokal. Hal ini mengingat kelompok migran tersebut memiliki modal cukup untuk bersaing di pasar kerja yang ada termasuk dalam menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kelompok-kelompok migran kembali asal Lombok Timur khususnya dapat menjadi agen transformasi pembangunan yang penting di daerah asalnya.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh sepanjang penelitian ini dilakukan, maka ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat disarankan untuk perbaikan kebijakan khususnya berkaitan dengan kebijakan penempatan tenaga kerja luar negeri dan kebijakan pembangunan daerah pada umumnya.

Pertama, re-orientasi program pembangunan daerah melalui perencanaan yang matang dengan memprioritaskan terciptanya peluang-peluang berusaha bagi masyarakat di segala lapisan sosial dan ekonomi harus menjadi satu agenda penting dalam pelaksanaan pembangunan pada masa sekarang dan akan datang.

Kedua, perlunya pemerintah daerah mempertimbangkan terciptanya peluang-peluang kerja baru berdasarkan kekuatan-kekuatan dan potensi ekonomi lokal yang dapat menjadi salah satu unit penting dalam perencanaan pembangunan yang berorientasi kerakyatan. Hal ini terutama untuk kepentingan menarik sumber-sumber kekuatan ekonomi daerah untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Dengan demikian, akumulasi kekuatan lokal dalam meningkatkan kemampuan ekonominya akan memberikan dukungan kuat bagi nafas kehidupan ekonomi yang lebih stabil.

Ketiga, perlunya mempertimbangkan kontribusi migran dalam seluruh proses pembangunan secara integral untuk memaksimalkan potensi ekonomi migran yang ada. Hal ini mengingat

besarnya remitan yang dibawa migran dari daerah asal sangat potensial untuk memperkuat sumber-sumber ekonomi daerah. Namun demikian, rekomendasi ini perlu juga mempertimbangkan tingkat ketrampilan migran kembali yang mungkin dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan terutama untuk sektor-sektor tertentu.

Keempat, pentingnya pemerintah daerah menciptakan aturan-aturan atau perangkat peraturan daerah yang dapat digunakan sebagai dasar hukum yang cukup kuat untuk melakukan kontrol terhadap seluruh aktivitas dan proses migrasi khususnya di tingkat lokal. Hal ini penting terutama untuk memberikan perlindungan memadai kepada migran tenaga kerja sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap aktivitas migrasi yang dilakukan dan sekaligus memberikan rasa aman bagi migran dalam seluruh aktivitas migrasi yang dilakukan sejak proses awal hingga kembali ke daerah asalnya dengan selamat.

Kelima, pemerintah daerah dengan semangat otonomi yang telah diperoleh perlu memberikan ruang berusaha lebih luas kepada kelompok migran kembali dan keluarganya untuk menarik keterlibatan kelompok tersebut dalam proses pembangunan ekonomi yang lebih luas. Program ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan dana stimulan melalui koordinasi instansi-instansi terkait untuk menjamin bahwa program yang dilaksanakan berjalan sesuai rencana dan semangat pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, H and J. Taylor. 1985. *Regional economics and Policy*. Oxford: Philip Allan Ltd.
- Appleyard, Reginald. 1989. "International Migration and Developing Countries" dalam Reginald Appleyard (ed), *The Impact of International Migration on Developing Countries*. Paris: OCDE, hlm. 19-36.
- Bach, Robert L. dan Lisa A. Schraml. 1982. "Migration, Crisis and Theoretical Conflict", *International Migration Review*, 16 (2): 320-341.
- Batey, Peter dan Peter Brown. 1995. "From Human Ecology to Customer Targeting: the Evaluation of Geo-demographics" dalam Paul Longley dan Graham Clarke (eds), *GIS for Business and Service Planning*. Glasgow: Geo-Information International.
- Bedford, R.D. 1981. "The Variety of Forms of Population Mobility in Southeast Asia and Melanesia, The Case of Circulation" dalam G.W. Jones dan Richter H.V., eds. *Population Mobility and Development in Southeast Asia and the Pacific*. Canberra: ANU, hlm. 17-50.
- Base, Ashis. 1996. *Demographic Transition and Demographic Imbalance in India*. *Health Transition Review*. Supplement No. 6, hlm. 89-99.
- Bogue, Donald J. 1969. *Principle of Demography*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Chan, Paul 1983. "Population Distribution and Development Strategies in Peninsular Malaysia" dalam A.S. Oberai (ed) *State Policies and Internal Migration: Studies in Market and Planned Economics*. New York: St. Martin's Press.
- Ehn Hyun Choe, Young Il Chung dan Young Chan Byun (eds.) 1986. *International Migration and Socio-Economic Development*. Korea: Korea Institute for Population and Health, National Bureau of Statistics, Economic Planning Board United Nation Fund for Population Activities.
- Frenkel, I. 1983. "Socio-Economic Development and Rural Urban Migration in Poland" dalam A.S. Oberai (ed) *State Policies and Internal Migration: Studies in Market and Planned Economics*. New York: St. Martin's Press.
- Friedmann dan Flora Sullivan. 1974. "The Absorption of Labour in the Urban Economy: The Case of Developing Countries", *Economic Development and Cultural Change*, 22: 385-413.

- Goma, Johana Naomi. 1993. *Mobilitas Tenaga Kerja Flores Timur ke Sabah Malaysia dan Pengaruhnya terhadap Daerah Asal. Studi Kasus desa Neleren, Kecamatan Adonaru Kabupaten Flores Timur*. Yogyakarta: Tesis S-2 UGM, tidak dipublikasikan.
- Guinness, Patrick. 1990. "Indonesian Migrants in Johor: An Itinerant Labour Force", *Bulletine of Indonesian Economic Studies*, 26 (1): 117-130.
- Grieco, Elizabeth M. 1998. "The Effects of Migration on the Establishment of Networks: Case Disintegration and Reformation Among the Indians of Fiji", *International Migration Review*, 32 (3): 704-735.
- Haris, Abdul 1997. *Mobilitas Ilegal orang Sasak Ke Malaysia Barat: Proses dan Dampaknya Bagi Daerah Asal*. Tesis S-2 UGM. Tidak dipublikasikan.
- Hugo, Graeme J. 1993. "Indonesia Labour Migration to Malaysia: Trends and Policy Implication", *South-Asian Jurnal of Social Science*, 21 (1): 78-95.
- , 1995. "Urbanization in Indonesia: City and Countryside Linked" dalam Josep Gugler (ed), *Patterns of Third World Urbanization*. London: Oxford University Press.
- , 1996. *Economic Impacts of International Labor Emigration on Regional and Local Development: Some Evidence From Indonesia*. Paper at Annual Meeting of Population Association of America, New Orleans.
- Kritz, Mary M. and Hania Zlotnik. 1992. "Global Interactions, Migration Systems, Processes and Policies" dalam Mary M. Kritz, et,al (eds.) *International Migration Systems, A Global Approach*. Oxford: Clarendon Press.
- Lee, Everett S. 1976. *Suatu Teori Migrasi* (terj. Peter H.). Yogyakarta: PPK UGM.
- Lohrmann, Reinhard. 1989. "An Emerging Issue in Developing Countries" dalam Reginald Appleyard (ed.), *The Impact of International Migration on Developing Countries*. Paris: OCDE, hlm.129-140.
- Mabogunje, Akin L. 1972. *Man, Space and Environment*, edited by Poulword English & Robert C. New York: Oxford University Press.
- Mantra, Ida Bagoes. 1989. *Mobilitas Penduduk Sirkuler dari Desa ke Kota di Indonesia*. Yogyakarta: PPK UGM.
- , 1994. "Mobilitas Sirkuler dan Pembangunan Daerah Asal", *Warta Demografi*, 24 (3).
- , 1995. *Mobilitas Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia*. Makalah Seminar Bulanan PPK UGM.

- Mantra, Ida Bagoes dan kasto. 1986. "Penentuan Sampel" dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Marshal, Paule. 1987. "Black Immigran Woman in Brown Girl, Brownstone" dalam Constance R Sutton dan Elsa M Chaney, *Caribbean Life in New York City: Socio-cultural Dimension*. New York: Center for Migration Studies of New York.
- Massey, Douglas S., at.als. 1990. "Theories of International Migration: a Review and Appraisal", *Population and Development Review*, 19 (1): 431-466.
- Myers, Dowell dan Seong Woo Lee. 1998. "Immigran Trajectories into Homeownership: A Temporal Analysis of Residential Assimilation", *International Migration Review*, 32 (3): 593-625.
- Myrdal, Gunnar. 1971. "Agricultural Development and Planning in the Under-Developed Countries Outside the Socialist Sphere", *Policies, Planning and Management for Agricultural Development. Proceeding of the Fourteenth International Conference of Agricultural Economists*. London: Oxford University Press.
- Nasution, M. Arif. 1997. *Aliran Pekerja Indonesia ke Malaysia: Kes Tentang Pekerja dalam Sektor Binaan di Kuala Lumpur Malaysia*. Disertasi Ph.D UKM Bangi.
- Pillai, P. 1992. *People on the Move: An Overview of Recent Immigration and Immigration in Malaysia*. Kuala Lumpur: ISS
- Plane, David A. dan Peter A. Rogerson. 1994. *The Geographical Analysis of Population with Application to Planning and Business*. Singapore: John Wiley & Son, Inc.
- Sassen-Kob, Saskia. 1987. "Formal and Informal Association Dominican and Colombians in New York" dalam Constance R Sutton dan Elsa M Chaney, *Caribbean Life in New York City: Socio-cultural Dimension*. New York: center for Migration Studies of New York.
- Singer, Audrey dan Douglas S Massey. 1998. "The Social Process of Undocumented Border Crossing Among Mexican Migrants", *International Migration Review*, 32 (3): 561-592.
- Salam, Solihin. 1992. *Lombok Pulau Perawan*. Jakarta: Kuning Mas.
- Standing, Guy. 1985. *Konsep-Konsep Mobilitas di Negara Sedang Berkembang*. Yogyakarta: PPK-UGM.
- Stark, Oded. 1991. *The Migration of Labor*. Oxford: Basil Blackwell Ltd.

- Sutton, Constance R. 1987. "The Caribbeanization of New York City and The Emergence of A Transnational Socio-cultural System" dalam Constance R Sutton dan Elsa M Chaney, *Caribbean Life in New York City: Socio-cultural Dimension*. New York: Center for Migration Studies of New York.
- Todaro, Michael P. 1995. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (edisi Ind.). Jakarta: Erlangga.
- Urip, Sunaryo. 1995. *Changing Migration Differentials and Regional Economic inequality in Indonesia*. Ph.D. Thesis Flinders University.
- Wood, C.H. 1982. "Equilibrium and Historical-Structuralist Perspective on Migration", *International Migration Review*, 16 (2): 298-319.
- Zelinsky, W. 1971. "The Hypothesis of the Mobility Transition", *Geographical Review*, 42 (2): 219-249.
- Zlotnik, Hania. 1992. "Empirical Identification of International Migration Systems" dalam Mary M. Kritz, Lin Leam Lim, Hania Zlotnik, *International Migration Systems, A Global Approach*, Oxford: Clarendon Press.
- , 1998. "International Migration 1965-1996: An Overview", *Population and Development Review*, 24 (3): 429-468.